

TEORI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Leni Pitri Sari¹, Miftahul Khairiyah², Afriza³, Muhammad Amin⁴
sarilenipitri@gmail.com¹, miftahulkhairiyah164@gmail.com², afriza@uin-suska.ac.id³,
muhammadaminfst@gmail.com⁴

Uin Suska Riau

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan merupakan aspek krusial dalam menentukan arah dan kualitas sistem pendidikan suatu negara. Namun, proses perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari faktor internal maupun eksternal. Diperlukan pendekatan teoretis yang solid untuk memahami dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan kerangka teoretis dalam memahami proses kebijakan pendidikan, serta mengeksplorasi pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang efektif dan adil. Metode yang digunakan dalam mengkaji pembahasan ini adalah metode Library Research. Teori ini mencakup teori pluralisme, teori elit, teori kepentingan publik, dan teori tekanan kelompok. Masing-masing teori memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami proses kebijakan pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada pembahasan ini dengan memahami teori-teori tersebut, para pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan akademisi dapat menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pendidikan dengan lebih komprehensif, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: Teori, Kebijakan, Pendidikan.

ABSTRACT

Education policy is a crucial aspect in determining the direction and quality of a country's education system. However, the process of formulating and implementing education policies often faces complex challenges, both from internal and external factors. A solid theoretical approach is needed to understand the dynamics and factors that influence education policy. This research aims to examine and develop a theoretical framework in understanding the education policy process, as well as exploring approaches that can be used in the formulation, implementation and evaluation of effective and fair education policies. The method used in reviewing this discussion is the Library Research method. This theory includes pluralism theory, elite theory, public interest theory, and group pressure theory. Each theory provides a different perspective in understanding the educational policy process and the factors that influence it. In this discussion, by understanding these theories, policy makers, educational practitioners and academics can analyze and evaluate education policies more comprehensively, as well as identify challenges and opportunities in efforts to improve the quality of education.

Keywords: *Theori, Education, Policy.*

PENDAHULUAN

Dibutuhkan pengawasan untuk menjaga kepatuhan terhadap suatu aturan. Kebijakan berperan sebagai upaya untuk mengontrol agar aturan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Aturan yang dimaksud dalam dunia pendidikan adalah seperangkat regulasi yang diberlakukan untuk mengelola pelaksanaan sistem pendidikan. Pentingnya kebijakan pendidikan tidak dapat disangkal karena proses pendidikan terjadi dalam berbagai bentuk dan mekanisme di berbagai lembaga. Sebagai contoh, di sektor industri, terdapat sistem pendidikan yang berjalan. Di samping itu, dalam konteks institusi keagamaan, terdapat pula sistem pendidikan seperti madrasah dan bentuk lainnya. Karenanya, tidaklah memadai hanya dengan memiliki peraturan semata untuk mencapai efektivitas dalam pendidikan tanpa adanya kebijakan yang mengatur implementasi dari peraturan-peraturan tersebut.

Setiap negara, termasuk Indonesia, menghadapi sejumlah masalah publik yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan. Ketika membicarakan urusan publik, fokusnya adalah pada tujuan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Warga negara dihadapkan pada beragam kebutuhan dan tuntutan dalam hal pendidikan yang merupakan salah satu hak fundamental mereka sebagai anggota masyarakat. Kebijakan publik dalam sektor pendidikan diatur oleh berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 32 UUD 1945. Salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan kebijakan pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi pijakan hukum yang penting untuk menghasilkan berbagai kebijakan publik di bidang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengkaji pembahasan ini adalah Library Research. Library Research atau penelitian kepustakaan, adalah metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi. Tujuan utama Library Research adalah menyediakan landasan teori yang kuat, informasi yang relevan, dan menghindari duplikasi penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Pluralisme

Pluralisme merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "plural" yang menggambarkan banyaknya atau keberagaman, dan "isme" yang merujuk pada suatu doktrin atau paham. Dalam pengertian ini, pluralisme mengacu pada pandangan atau teori yang mengakui bahwa kenyataan terdiri dari berbagai macam substansi atau entitas yang beragam. Konsep pluralisme menekankan pentingnya menerima keberagaman dalam segala hal. Inti dari pluralisme adalah kesediaan yang tulus dari setiap individu untuk menerima keberagaman yang ada di sekitar mereka. Mengembangkan ketulusan hati tidaklah merupakan tugas yang sederhana bagi baik individu maupun komunitas secara menyeluruh, karena memerlukan tingkat kesadaran yang tinggi, latihan yang konsisten, kebesaran jiwa, dan kedewasaan pribadi. Pluralisme tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesadaran dalam dimensi teologis, melainkan juga dalam dimensi sosial. Dampak dari hal ini adalah pemahaman bahwa manusia berada dalam lingkungan masyarakat yang kaya akan keragaman agama, budaya, etnis, dan aspek sosial lainnya. Pluralisme tidak hanya melibatkan pemahaman dalam konteks teologis, tetapi juga dalam konteks sosial. Memahami pluralisme bukan sekadar mengakui keragaman etnis dan agama dalam masyarakat kita, karena itu hanya mencerminkan pecahan masyarakat daripada hakikat sejati dari pluralisme. Pluralisme harus dipahami sebagai ikatan erat antara keberagaman di dalam struktur kehidupan beradab. Ini mencakup sikap toleransi terhadap beragam kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara.

Pluralisme mengacu pada keberagaman latar belakang agama dalam kehidupan masyarakat, di mana berbagai agama hidup berdampingan, bekerja sama, dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini menekankan bahwa penganut agama harus tidak hanya menghormati dan mengakui hak-hak agama lain, tetapi juga terlibat dalam usaha yang aktif untuk memahami baik perbedaan maupun persamaan, dengan tujuan mencapai kedamaian dan keharmonisan bersama. Dalam perspektif sosiologi agama, pluralisme agama menandakan pandangan yang menghargai serta menerima keragaman sebagai sesuatu yang bernilai positif, dilihat sebagai anugerah dan ketentuan

ilahi bagi umat manusia. Penerimaan terhadap keragaman agama melibatkan pengakuan bahwa agama yang dianut merupakan jalan keselamatan yang benar, sementara menghormati keyakinan bahwa agama lain juga memiliki kebenaran yang sama kuatnya sesuai dengan keyakinan masing-masing penganut. Dari pemahaman ini, akan muncul sikap toleransi, inklusif, serta rasa saling menghormati dan menghargai, yang juga mencakup memberikan kesempatan kepada individu lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan yang Maha Esa, serta disokong oleh Pasal 29 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan individu. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, selain memastikan kebebasan beragama, ini juga menjamin bahwa tidak akan ada diskriminasi berdasarkan agama di Indonesia.

Dalam pandangan filosofis Mukti Ali, ia menggunakan istilah "setuju dalam perbedaan" untuk menggambarkan konsep *agree in disagreement*. Menurut pandangannya, setiap agama memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan dalam kerangka kemanusiaan. Pemisahan agama-agama dalam konteks kemanusiaan bertentangan dengan prinsip pluralisme, yang menjadi ciri khas utama dari masyarakat manusia dan tidak dapat dihindari. Indonesia, dengan beragam segi seperti etnis, bahasa, agama, budaya, dan lain-lain, dianggap salah satu negara paling majemuk di dunia. Para tokoh pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya pluralisme, yang tercermin dalam moto nasional "Bhinneka Tunggal Ika".

Pada era saat ini, wacana tentang pluralisme semakin populer di kalangan banyak orang, terutama karena meningkatnya jumlah konflik yang muncul, yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan agama. Untuk menanggulangi hal ini, diperlukan pendekatan ilmiah yang disebut Pluralisme Agama. Tidak semua orang sepakat atau memiliki pandangan yang sama terkait konsep pluralisme agama. Meskipun ada yang mendukung dan berharap pada konsep tersebut, ada juga yang memiliki kekhawatiran dan kecurigaan terhadapnya. Menurut M. Amin Abdullah, kegelisahan yang dirasakan umat beragama terkait dengan keberadaan pluralitas terkait dengan akibat dan implikasi yang timbul dari pengakuan resmi terhadap prinsip relativitas. Relativitas, sebagai akibat dari pluralitas, dianggap sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan bahkan bisa dianggap sebagai aspek yang terkait erat dengan pluralisme.

Dasar-dasar Pluralisme:

a. Dasar Filosofis kemanusiaan

Penerimaan terhadap keberagaman dalam konsep pluralisme adalah suatu prinsip yang mutlak dan tak dapat dipertanyakan. Hal ini merupakan hasil langsung dari prinsip dasar kemanusiaan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang sama-sama memiliki martabat yang tinggi, memiliki aspek-aspek esensial yang serupa, dan memiliki tujuan hidup yang seragam, yakni mencapai kedamaian dan kesejahteraan baik secara fisik maupun mental. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, manusia menunjukkan perbedaan satu sama lain, baik dalam hal individu maupun dalam kelompok-kelompok, dalam hal eksistensi, pola hidup, dan tujuan hidup.

b. Dasar sosial kemasyarakatan dan budaya

Mengakui keberadaan dan penerimaan terhadap kemajemukan adalah hasil dari komitmen sosial dan konstitusional yang konsisten dalam masyarakat yang memiliki budaya, baik itu suku, bangsa, bahkan dunia. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kemajemukan adalah konsekuensi dari karakteristik asli manusia sebagai makhluk sosial.

c. Dasar teologis

Di dalam masyarakat agamis seperti di Indonesia, terdapat berbagai agama yang berbeda dalam banyak hal, baik itu aspek-aspek atau unsur-unsurnya. Penting untuk

menerima kemajemukan ini sebagai hasil dari nilai-nilai luhur yang tercermin dalam konsep Ilahi yang baik serta tujuan yang mulia dari setiap agama dan pengikutnya.

2. Teori Elit

Definisi elit mencakup beragam dimensi dan dapat dipahami dari berbagai perspektif. Dalam konteks sosiologi, elit merujuk pada kelompok yang menduduki posisi penting dalam berbagai bidang seperti administrasi negara, urusan politik, kegiatan ekonomi, dan urusan keagamaan. Sejak tahun 1900, masyarakat Indonesia mengakui adanya dua tingkatan sosial, yakni kelompok umum dan golongan priyayi. Orang-orang yang terlibat dalam administrasi, bekerja sebagai pegawai pemerintahan, dan memiliki pendidikan di Indonesia dianggap sebagai elit atau priyayi. Dengan demikian, elit merujuk kepada individu yang berada di lapisan sosial di atas rakyat jelata dan memiliki peran dalam memimpin, memengaruhi, membimbing, dan mengatur masyarakat.

Ketika elit dihubungkan dengan kekuasaan dan otoritas, dapat dibedakan antara dua jenis, yaitu elit yang memiliki kekuasaan formal dan elit yang memiliki pengaruh tanpa kedudukan resmi. Selain itu, istilah elit juga mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki dampak yang signifikan dalam urusan pemerintahan. Pada abad ke-17, pengertian elit merujuk kepada segelintir kelompok sosial yang memegang peranan dominan, seperti pasukan militer atau kelas bangsawan. Di konteks klasik, elit sering dikaitkan dengan kelompok yang mempunyai kekuasaan politik yang besar. Akan tetapi, dalam masyarakat Cina, istilah shen-shih atau elit merujuk pada sekelompok individu yang menempati jabatan dan peran tertentu dalam struktur tradisional masyarakat Cina.

Dalam organisasi masyarakat tradisional Cina, istilah "elit" merujuk pada sejumlah orang yang menempati peran dan tanggung jawab khusus dalam struktur sosialnya. Setiap komunitas diperintah oleh sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menduduki posisi dominan dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka yang berhasil mencapai pusat kekuasaan selalu dianggap sebagai yang terbaik dan diakui sebagai bagian dari kelompok elit. Kelompok elit mengacu pada individu yang berhasil mencapai posisi tinggi dalam struktur sosial masyarakat. Pareto membagi kelompok elit menjadi dua kategori. Pertama, terdapat kelompok elit yang memerintah (*governing elite*), yang terdiri dari individu-individu yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, ada elit yang tidak terlibat dalam pemerintahan (*non-governing elite*). Jadi, masyarakat terbagi menjadi dua lapisan: lapisan bawah dan lapisan atas, yang masing-masing terbagi lagi menjadi elit yang terlibat dalam pemerintahan dan elit yang tidak terlibat dalam pemerintahan.

Dalam organisasi sosial masyarakat, terdapat selalu dua kelas, yaitu kelas yang memiliki kekuasaan dan kelas yang dikuasai. Mosca meyakini bahwa kelas yang memiliki kekuasaan, meskipun jumlahnya lebih sedikit, menguasai semua fungsi politik, mengendalikan kekuasaan secara eksklusif, dan menikmati keistimewaan. Kelas yang berkuasa adalah kelompok minoritas yang menguasai semua aspek politik, memiliki kontrol penuh atas kekuasaan, dan menikmati berbagai keistimewaan. Dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Mayoritas dalam masyarakat yang diperintah adalah kelas yang dikuasai, yang kendaliannya dilaksanakan oleh kelas yang berkuasa dengan cara yang mungkin dianggap otoriter dan kejam pada masa sekarang. Sifat utama dari elit adalah kemampuannya untuk memimpin dan mengontrol ranah politik. Jika kelas yang berkuasa kehilangan dukungan dan individu di luar lingkaran elit menunjukkan kemampuan yang lebih baik, kemungkinan besar kelas yang berkuasa akan digulingkan dan digantikan oleh penguasa baru.

Terdapat dua kategori elit yang harus diperhatikan, yakni:

A. Elit Politik Lokal

Elite politik lokal adalah individu yang menjabat dalam posisi politik di level eksekutif dan legislatif di wilayah lokal. Mereka dipilih melalui proses pemilihan umum dan terlibat dalam dinamika politik demokratis di tingkat daerah. Para elit ini memiliki peran sentral dalam pemerintahan lokal dan bertanggung jawab atas pembuatan serta pelaksanaan kebijakan politik.

B. Elit Non Politik Lokal

Elite non-politik lokal adalah individu yang mengisi posisi kunci dan memiliki dampak signifikan dalam memandu individu dalam suatu komunitas spesifik. Mereka biasanya memiliki peran strategis dalam masyarakat dan memegang kendali atas berbagai aspek kehidupan di tingkat lokal. Mereka memegang kekuasaan yang signifikan dalam kelompok atau masyarakat dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan bagian yang substansial dari struktur kekuasaan yang ada. Kelompok elit merupakan entitas paling dominan dalam suatu sistem politik yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaan guna mencapai tujuan mereka. Mereka juga sering kali memiliki peran sentral di berbagai negara berkembang.

Secara keseluruhan, elit merujuk pada sekelompok individu yang menduduki posisi-posisi penting dalam masyarakat. Lebih khususnya, elit juga mencakup individu yang terkemuka dalam berbagai bidang tertentu, terutama kelompok kecil yang memiliki kendali atas pemerintahan dan lingkungan di mana kekuasaan tersebut dilaksanakan. Maka dari itu, penekanan pada pemahaman tentang elit sering kali berfokus pada elit politik. Ini menggambarkan pembagian kekuasaan antara kelompok elit yang memiliki kendali dan yang tidak memiliki, yang memiliki kepentingan yang beragam. Meskipun terdapat perbedaan yang jelas, dalam era demokrasi, ada koordinasi yang terbentuk dan terlihat antara elit yang berkuasa dan yang tidak.

3. Teori Kepentingan Publik

Kepentingan Publik merujuk pada kepentingan yang melibatkan negara, bangsa, dan mayoritas warga masyarakat. Ini mencakup seluruh spektrum masyarakat, termasuk pandangan dari berbagai golongan, agama, suku, dan status sosial. Dengan kata lain, Kepentingan Publik mencakup kebutuhan dasar orang banyak atau menjadi kebutuhan bersama semua individu. Konsep Kepentingan Publik bersifat fleksibel, karena istilah ini terus berubah seiring waktu dan kondisi di setiap periode. Diskusi tentang definisi Kepentingan Publik masih berlangsung sampai sekarang, dan tampaknya akan terus berlanjut karena terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, kepentingan umum dijelaskan sebagai "kepentingan yang penting bagi seluruh masyarakat." Penjelasan ini cukup sederhana karena hanya mencakup satu aspek, sehingga arti kepentingan umum menjadi sangat luas. Perbedaan definisi dan batasan mengenai kepentingan umum terlihat jelas dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa kepentingan umum merujuk pada kepentingan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengindahkan apakah kepentingan tersebut mengarah pada pencarian keuntungan atau tidak. Di sisi lain, pasal 5 ayat (1) dari keputusan yang sama menyebutkan bahwa kepentingan umum dalam konteks pengadaan tanah adalah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah tanpa tujuan mencari keuntungan. Selain itu, terdapat 14 bidang kegiatan yang masuk dalam kategori kepentingan umum.

Secara umum, terdapat tiga teori mengenai kepentingan publik:

a. Kepentingan publik sebagai penjumlahan kepentingan pribadi (preponderance theory)

Teori ini berpendapat bahwa kepentingan publik sebenarnya berasal dari kepentingan individu yang digabungkan. Ini berarti, kepentingan publik pada dasarnya merupakan hasil dari beragam kepentingan pribadi yang disatukan. Dengan kata lain,

kepentingan publik tidak selalu bertentangan dengan kepentingan individu karena merupakan agregat dari kepentingan-kepentingan tersebut. Teori ini juga dikenal sebagai teori mayoritas karena menyatakan bahwa kepentingan publik adalah hasil dari pandangan mayoritas. Menurut teori ini, kepentingan publik ditentukan oleh apa yang diinginkan oleh mayoritas orang. Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh mayoritas, bisa dilihat dari hasil survei, peringkat, dan berbagai data lainnya. Namun, kritik terhadap teori ini adalah bahwa hak-hak kelompok minoritas sering diabaikan. Misalnya, penonton televisi yang menyukai pertunjukan seni tradisional seperti wayang atau ketoprak mungkin tidak mendapatkan tayangan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang dianggap sebagai kepentingan publik, yaitu yang disukai oleh banyak orang.

b. Kepentingan publik sebagai kepentingan bersama (common interest)

Teori ini berakar pada konsep yang diperkenalkan oleh J.J. Rousseau. Menurut teori tersebut, kepentingan publik terkait erat dengan kepentingan bersama. Di samping kepentingan pribadi, setiap individu pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama-sama penting untuk kesejahteraan bersama. Misalnya, dalam hal sistem keuangan, listrik, dan transportasi. Teori ini menyoroti keberadaan barang-barang publik, yang merupakan barang-barang yang tidak dimiliki oleh individu secara pribadi. Menurut teori ini, kepentingan publik tidak hanya merupakan hasil akumulasi dari pendapat individu, karena kepentingan umum memiliki posisi yang berbeda dengan kepentingan pribadi. Misalnya, menurut teori ini, acara sinetron atau hiburan televisi tidak dianggap relevan dengan kepentingan publik. Meskipun acara-acara tersebut memiliki jumlah penonton yang besar, itu hanya mencerminkan preferensi atau keinginan individu. Di sisi lain, program-program yang membahas informasi politik atau liputan tentang korupsi oleh pejabat negara dianggap sebagai contoh program yang relevan dengan kepentingan publik. Program-program tersebut menyoroti isu-isu yang berdampak secara kolektif pada masyarakat atau komunitas. Teori ini menegaskan adanya kepentingan bersama yang tidak hanya bergantung pada preferensi atau pendapat individu. Contohnya, aturan yang mengharuskan media memberikan perhatian yang sama kepada semua partai politik selama kampanye pemilu. Hal ini juga mencakup kewajiban bagi media untuk memberikan sorotan kepada kelompok-kelompok minoritas, perempuan, buruh, dan penyandang cacat. Dalam teori ini, ini dianggap sebagai bagian dari kepentingan bersama sebagai warga negara, meskipun mungkin tidak diminati oleh sebagian besar pemirsa. Teori ini menekankan bahwa media seharusnya memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok ini, bahkan jika berita tentang mereka tidak populer di antara pemirsa.

c. Kepentingan publik sebagai kesatuan (unitary theory)

Dalam teori ini, kepentingan publik dipandang sebagai konsep yang terkait erat dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks saat ini, hal ini terhubung dengan sistem politik dan hukum suatu masyarakat atau negara. Kepentingan publik dianggap sebagai elemen penting dalam struktur politik, yang menentukan penilaian atas hal-hal yang dianggap sebagai kepentingan publik. Teori ini membuat perbedaan antara preferensi atau pilihan individu dan kepentingan umum. Preferensi mengacu pada apa yang mayoritas inginkan, sedangkan kepentingan terkait dengan apa yang dianggap penting oleh standar moral, hukum, dan sistem sebagai kepentingan publik.

4. Teori Tekanan Kelompok

Teori tekanan kelompok adalah cara berpikir dalam sosiologi yang mempelajari bagaimana individu dalam suatu kelompok dipengaruhi oleh norma, nilai, dan tekanan sosial di lingkungan kelompok mereka. Ini juga dikenal sebagai teori konformitas sosial, yang menjelaskan bagaimana individu cenderung menyesuaikan perilaku dan

pandangan mereka dengan norma atau harapan kelompok. Konformitas terjadi ketika seseorang mengadaptasi sikap dan perilakunya agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Ini berarti bahwa individu mengalami perubahan dalam cara mereka berpikir dan bertindak karena dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok di mana mereka berada, dengan maksud agar sesuai dengan aturan dan norma yang diterima di dalam lingkungan kelompok tersebut.

Adapun penerapan dari tekanan kelompok yaitu Peer Pressure. Peer pressure adalah pengaruh atau dorongan yang timbul dari rekan sebaya yang memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginannya. Ini terjadi karena individu ingin merasa diterima oleh kelompok sosialnya. Peer pressure adalah persaan dorongan atau tekanan yang berasal dari teman sebaya yang mengajak individu untuk melakukan tindakan serupa, karena harapan akan mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Contoh- contoh dari Peer pressure adalah sebagai berikut:

a. Peer Pressure Positif

Contoh dari peer pressure yang positif termasuk pengembangan bakat, peningkatan pengetahuan dan pengalaman, menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan, menerima perbedaan pendapat dengan toleransi, serta menjadi terampil dan peduli terhadap keadaan teman.

b. Peer Pressure Negatif

Contoh peer pressure negatif adalah ketika seseorang merasa terdorong oleh teman sebaya untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sehat, seperti membolos sekolah, mengonsumsi narkoba, minum minuman beralkohol, menyontek, melakukan pencurian, dan tindakan lain yang melanggar norma dan aturan yang berlaku.

Pengaruh tekanan dari teman sebaya pada remaja dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor individu dan faktor kontekstual. Faktor individu mencakup atribut khusus dari remaja tersebut, seperti jenis kelamin dan usia, sementara faktor kontekstual melibatkan lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk lingkungan sekolah, tempat tinggal, dan keseluruhan komunitas.

Tekanan dari teman sebaya bisa dikendalikan atau dimoderasi oleh empat faktor:

- a) Sikap terbuka seseorang memengaruhi sejauh mana ia dipengaruhi oleh teman sebaya.
- b) Pentingnya pengaruh dari teman sebaya berperan dalam menentukan seberapa besar tekanan yang dirasakan.
- c) Peluang untuk memengaruhi orang lain juga memengaruhi seberapa besar seseorang dipengaruhi oleh teman sebaya.
- d) Tingkat kedekatan hubungan dengan teman sebaya juga berperan dalam memoderasi pengaruh mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tentang teori kebijakan pendidikan dapat disimpulkan bahwa teori Pluralisme menekankan keberagaman dan persaingan dalam kehidupan politik, di mana beragam kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kekuasaan dan pengaruh politik. Namun, dalam praktiknya, terdapat kritik terhadap asumsi bahwa akses yang sama selalu terjadi, karena faktor-faktor seperti kekayaan dan kekuatan masih memainkan peran penting dalam menentukan pengaruh politik.

Teori Elit menyoroti dominasi kelompok elit dalam mengendalikan kekuasaan politik dan membuat keputusan yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, kritik terhadap teori ini mencatat bahwa ada ruang bagi pengaruh dari berbagai kelompok, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda.

Teori Kepentingan Publik menekankan perlunya pemerintah bertindak untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Namun, tantangan dalam mengidentifikasi dan mengakomodasi kepentingan publik yang sebenarnya seringkali menjadi fokus kritik terhadap teori ini.

Teori Tekanan Kelompok menyoroti peran kelompok-kelompok kepentingan dalam mempengaruhi proses politik melalui tekanan dan advokasi. Namun, kritik terhadap teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan tekanan kelompok seringkali bergantung pada faktor-faktor seperti sumber daya dan akses ke kekuatan politik.

Daftar Pusaka

- B.B, Brown, J. P. Bakken, S. W. Ameringer, & S. D. Mahson (2016). "A Comprehensive Conceptualization of the Peer Influence Process in Adolescence", dalam Hubungan Peer pressure Dengan Misbehavior Siswa Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren. Malang: UMM.
- Denhart, Jane V. and Robert B. Denhart (2015). *The New Public Service*. ME. Sharpe, New York.
- Frederickson, H. Goerge (2021). *New Public Administration*. University of Alabama Press, Tuscaloosa.
- Gokma Toni Parlindungan S (2019). Pengisian Jabatan Perangkat Nagari Pemekaran Di Pasaman Barat Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Ensiklopedia Of Journal*, Vol 1 No 2 Edisi 2.
- Harniwati (2019). Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004. Volume 1, Nomor 3.
- Heather Sutherland (2020). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta; Sinar Harapan.
- J.W, Santrock (2016). "Psikologi Pendidikan", dalam Hubungan Peer pressure Dengan Misbehavior Siswa Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren. Malang: UMM.
- Jasmir (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha. *Journal Sumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Jumrawarsi Jumrawarsi (2020). Neviyarni Suhaili, Peran Seorang Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Kondusif. *Ensiklopedia Education Review*, Vol 2, No 3.
- Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2020, pasal 1 ayat (3).
- Lotar & Kamenov (2016). "Susceptibility to Peer pressure and Attachment to Friends", dalam Hubungan Peer pressure Dengan Misbehavior Siswa Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren. Malang: UMM.
- Moch Nurhasim dkk (2019). *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.
- Robert Van Niel (2015). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- S.E, Taylor (2016). "Health Psychology", dalam Hubungan Dukungan Sosial Dengan Stres Narapidana Wanita, Malang: UMM.
- Sartono Kartodirji (2018). *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. LP3ES: Jakarta.